

Perkalian Antara Kemungkinan dan Dampak, apabila Risiko Terjadi

Skor	Paparan Risiko Wajib
23 s.d. 25	Sangat Tinggi
18 s.d. 22	Tinggi
9 s.d. 17	Sedang
4 s.d. 8	Rendah
1 s.d. 3	Sangat Rendah

Kriteria RISIKO (KEMUNGKINAN/KETERJ)	
Seberapa sering Dampak dari Risiko akan terjadi terhadap Tujuan	
Skor	Paparan Risiko Wajib
5	Hampir Pasti Terjadi
4	Sangat Sering Terjadi
3	Sering Terjadi
2	Kadang Terjadi
1	Jarang Terjadi

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian Negara ≤Rp10 juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke Organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda diatas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 Kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di mediamassa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d80%	Pelayanan tertunda diatas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di mediamassa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

*AREA DAMPAK YANG TERKENA, BISA DIPILIH SALAH SATU misal: DAMPAK HANYA PADA PENURUNAN KINERJA, pencapaian target menjadi

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN		
Hampir Tidak Terjadi (1)	• Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) • Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dalam 1 periode		
Jarang Terjadi (2)	• Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) • Persentase kemungkinan terjadinya 5%		
Kadang Terjadi (3)	• Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun) • Persentase kemungkinan terjadinya di		
Sering Terjadi (4)	• Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun) • Persentase kemungkinan terjadinya di		
Hampir Pasti Terjadi (5)	• Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) • Persentase kemungkinan terjadinya lebih		
OPD yang menyusun Daftar Risiko			
1	Dispendukcapil	14	DTPHP
2	Setwan	15	DLHP
3	BPKPD	16	Bakesbangpol,
4	Dikpora	17	Disnakan
5	Dinkes	18	Dinas PMD
6	Dinas PUPR	19	Perkim
7	DPMPTSP	20	Dinkop
8	Dinas Indag (Bidang Pasar)	21	Disbudpar
9	Dishub		
10	BKPSDM		
11	BPKPD		
12	Bappeda Litbang		
13	Bagian PBJ		

Kriteria RISIKO (DAMPAK)

Dampak dari kejadian terhadap Tujuan,
apabila Risiko terjadi

Skor	Paparan Risiko
	Wajib
5	Katastoprik
4	Besar
3	Sedang
2	Kecil
1	Tidak Signifikan

C	Controlable : Risiko yang dapat dikendalikan, dapat diidentifikasi, dinilai, dan dikelola, dapat diatasi melalui tindakan dan keputusan proaktif Contohnya termasuk risiko nilai tukar mata uang, arus kas yang buruk, tuntutan hukum, dan masalah keterampilan
UC	Uncontrolable: Risiko yang tidak dapat dikendalikan, Merupakan kebalikan dari risiko yang dapat dikendalikan Contohnya termasuk bencana alam, kerusakan politik, perang, dan lingkungan hidup

Kepala Daerah	untuk risiko Pemda (Risiko Strategis Pemda)						
Kepala OPD	untuk risiko yang menghambat tujuan OPD/ pada Program (Risiko Strategis OPD)						
Kepala Bidang	untuk risiko pada Program/Kegiatan (Risiko Operasional)						
Internal	Sumber risiko berasal dari internal						
Eksternal	Sumber risiko berasal dari eksternal						
Internal & Eksternal	Sumber risiko berasal dari internal dan eksternal						
Pemerintah Kabupaten Magetan							
Perangkat Daerah							
Kepala OPD							
Pagawai OPD							
Masyarakat							

Kepala Daerah
Kepala OPD
Kepala Bidang
PA/PK

Konflik kepentingan

Pemberian suap

Penggelapan

Pemalsuan Data

Pemerasan/ Pungutan Liar

Penyalahgunaan wewenang

Fraud/ Korupsi

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP.	24.	36.	28.	28	RSP.24.36.28.28
RSO.	24.	36.	28.	28	RSO.24.36.28.28
ROO.	24.	36.	28.	28	ROO.24.36.28.28

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda
 RSO Strategis OPD
 ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- | | |
|---|--|
| 01 Pendidikan | 21 Persandian |
| 02 Kesehatan | 22 Kebudayaan |
| 03 PU dan Tata Ruang | 23 Perpustakaan |
| 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24 Kearsipan |
| 05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Masyarakat | 25 Kelautan dan perikanan |
| 06 Sosial | 26 Pariwisata |
| 07 Tenaga Kerja | 27 Pertanian |
| 08 Pemberdayaan Perempuan & | 28 Kehutanan/Perkebunan |
| 09 Pangan | 29 Energi dan sumber daya mineral |
| 10 Pertanahan | 30 Perdagangan |
| 11 Lingkungan Hidup | 31 Perindustrian |
| 12 Administrasi kependudukan dan | 32 Transmigrasi |
| 13 Pemberdayaan masyarakat dan desa | 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif |
| 14 Pengendalian penduduk dan keluarga | 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD |
| 15 Perhubungan | 35 Pembinaan dan Pengawasan |
| 16 Komunikasi dan informatika | 36 Perencanaan pembangunan, litbang |
| 17 KUKM | 37 Keuangan dan Pendapatan |
| 18 Penanaman Modal | 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 19 Kepemudaan dan olah raga | 39 Bencana |
| 20 Statistik | 40 Politik |
| | 99 Lainnya |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--|
| 01 Pemda | 18 Dinas Perhubungan |
| 02 Sekretariat Daerah | 19 Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 03 Sekretariat DPRD | 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah |
| 04 Inspektorat Daerah | 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu |

05 Dinas Pendidikan
06 Dinas Kesehatan
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
09 Satuan Polisi Pamong Praja
10 Dinas Sosial
11 Dinas Ketenagakerjaan
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

14 Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
 Sipil
16 Dinas Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana
17 Dinas PMD

Satu Pintu
22 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
27 Dinas Peternakan dan Perikanan
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan Daerah
30 Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia
31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

32 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

33 RSUD

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten Magetan

Tahun Penilaian

: 2024

Periode yang Dinilai

: Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026

Urusan Pemerintahan

: Unsur Kewilayahan

OPD yang Dinilai

: Kecamatan Bendo

Sumber Data	Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2024-2026					
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien					
Tujuan Strategis PD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan					
Sasaran Strategis PD	1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan Bendo					
Indikator Kinerja IKU/Program	IKU		INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI	PROGRAM PENDUKUNG
	1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Bendo	83.6	83.6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan Bendo	Nilai SAKIP Kecamatan Bendo	88.95	88.95	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Program yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa					
Magetan, Januari 2025 CAMAT BENDO						
HERMIN SUPRAPTIWI, SH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19690912 199803 2 009						

No	RPD							RENSTRA					Program	Sektor Unggulan
	Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Program RPD	Indikator Program	OPD/ Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program TA 2024	Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Skor IKM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Hasil Evaluasi AKIP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Bendo	Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sasaran :	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Sasaran : Predikat Kinerja Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	21,812,500	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah
					Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bendo	Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Sasaran : Predikat Kinerja Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	930,183,510	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa/Kelurahan dengan nilai monev terpadu 80 %	Kecamatan Bendo	Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Sasaran : Predikat Kinerja	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa/Kelurahan dengan nilai monev terpadu 80 %	55,700,000	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan	Kecamatan Bendo	Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sasaran :	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Sasaran : Predikat Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap layanan kesekretariatan Kecamatan Bendo	2,690,582,426	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD
- (2) Diisi Tujuan Pemda dalam RPJMD
- (3) Diisi dengan indikator pencapaian Tujuan Pemda dalam RPJMD
- (4) Diisi sasaran atas tujuan Pemda dalam RPJMD
- (5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD
- (6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran
- (7) Diisi dengan indikator program prioritas dalam RPJMD
- (8) Diisi dengan nama OPD/Unit Kerja yang bertanggungjawab atas program prioritas
- (9) Diisi dengan Irban yang bertanggungjawab atas pengawasan OPD/Unit Kerja (**TIDAK USAH DIISI**)
- (10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD
- (11) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja
- (12) Diisi program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran
- (13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra
- (14) Diisi dengan jumlah anggaran program pada tahun 2022 yang terdapat pada DPPA
- (15) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap Program di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD
- (16) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan sektor unggulan daerah
- (17) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait Program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dsb)

Isu Terkini
(17)

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Urusan Wajib/ Pilihan : Unsur Penunjang

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Magetan
Nama OPD : Kecamatan Bendo
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : Rensstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
Urusan Pemerintahan : Unsur kewilayahan

Hasil evaluasi APIP setelah
diskusi dengan manajemen

SETELAH EVALUASI

No	Tujuan Strategis/ Sasaran Strategis Pemda OPD/ Program	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI					Rencana Tindak Pengendalian		
			Risiko			Sebab		Controllable/ Uncontrollable	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkin an	Nilai Risiko (1x2x13)		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko				Dampa Uraian	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							Uraian	Kode Risiko	Pemilik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(24)	(29)	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan																						
	Tujuan Strategis Pemda 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kurang kepedulian dari Desa dan Kelurahan, serta para kasi untuk menyiapkan dokumen pendukung evaluasi Desa dan Kelurahan	RSP	Kepala Daerah	Kurangnya motivasi/ inovasi dari lap kasi dan pemerintah desa serta kelurahan	Internal& Eksternal	C	IKD Tidak tercapai	Masyarakat/Kepala Daerah	3	3	9	Melakukan motivasi serta adanya inovasi dari pemerintahan Desa								
	Sasaran Strategis Pemda 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kurang kepedulian dari Desa dan Kelurahan, serta para kasi untuk menyiapkan dokumen pendukung evaluasi Desa dan Kelurahan	RSP	Kepala Daerah	Kurangnya pembinaan serta inovasi dari pemerintah desa serta kelurahan	Internal& Eksternal	UC	Pelaksanaan Pelayanan terhadap Publik tidak berjalan dengan baik	Masyarakat/Kepala Daerah	2	2	4	Dilakukan pembinaan dan adanya inovasi dari pemerintahan Desa								
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengisi e - skm	RSP	Kepala Daerah	Kurangnya sosialisasi dan penekanan kepada penerima layanan untuk mengisi e-skm	Internal& Eksternal	C	Tidak dapat memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan	Masyarakat/Kepala Daerah	3	2	6	Melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan terkait pengisian survey kepuasan masyarakat								
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Kurang kepedulian dari Desa dan Kelurahan, serta para kasi untuk menyiapkan dokumen pendukung evaluasi Desa dan Kelurahan	RSP	Kepala Daerah	Belum adanya reward dan funishment	Internal& Eksternal	C	Turunnya Kinerja Kecamatan dan IKD		2	3	6									
Urusan Unsur Kewilayahan																						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Skor IKM	Penyelenggaraan pelayanan publik kurang maksimal	RSP 04	Kepala Daerah	kurang pahamiya beberapa penerima layanan terhadap teknologi dan informasi	Eksternal	C	Indek Kepuasan Masyarakat belum optimal	Masyarakat/Kepala Daerah	3	3	9	Mengusulkan pengadaan sarana dan prasana pendukung layanan publik yang memadai sesuai kebutuhan								
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Skor IKM	Kurangnya kualitas perencanaan dan penyusunan program kegiatan pemerintahan desa	RSP 05	Kepala Daerah	kurang pahamiya beberapa penerima layanan terhadap teknologi dan informasi	Eksternal	C	Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan desa tidak tepat waktu	Masyarakat/Kepala Daerah	2	2	4	Kepala daerah membuat program peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa								
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengelolaan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di masing- masing polka masih rendah	RSP 06	Kepala Daerah	Kurangnya disiplin dan kemampuan para perangkat atau aparatur desa dan kelurahan	Eksternal	C	Penyampaian laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tidak tepat waktu	Masyarakat/Pemeri tah Desa/kelurahan/Ke pala Daerah	3	2	6	Kepala daerah membuat program peningkatan kemampuan dan peningkatan kesadaran masyarakat desa								
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Belum Maksimal	RSD 01	Kepala Daerah	Kurangnya binaan terhadap desa dan kelurahan	Internal	C	Terlambatnya Kegiatan Pemerintah Desa	Masyarakat/Pemeri tah Desa/Kepala Daerah	2	2	4	Kepala Daerah Melakukan Movev Internal								

Hasil evaluasi APIP
setelah diskusi
dengan manajemen

Petunjuk Pengisian
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPD/Renstra
Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan
Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko (RSP + Risiko Strategis Pemda dimiliki oleh Kepala Daerah, RSO=Risiko Strategis OPD dimiliki oleh Kepala OPD)
Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom(9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/kena dampak jika risiko benar-benar terjadi
Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko
Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi
Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak
Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko
Kolom (31) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan
Untuk identifikasi risiko strategis Pemda maupun OPD bisa mempertimbangkan hal-hal yang menghambat pencapaian dari indikator dari tujuan/sasaran tersebut

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Urusan Wajib/ Pilihan : Unsur Penunjang

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Magetan
 Nama OPD : Kecamatan Bendo
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
 Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

Hasil evaluasi APIP setelah diskusi dengan manajemen

No	Tujuan Strategis/ Sasaran Strategis Pemda OPD/ Program	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI										Rencana Tindak Pengendalian	
			Risiko			Sebab		Controllable /Uncontrollable	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko (12x13)
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Uraian	Sumber			Uraian			Pihak yang Terkena	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Kewilayahan														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	Indeks Kepuasan masyarakat	Adanya potensi capaian indeks kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap kinerja kesekretariatan Kecamatan Bendo kurang optimal	RSO36	Kepala Kecamatan Bendo	Kurangnya jumlah pegawai, kompetensi, pelatihan dan motivasi seluruh ASN di sekretariatian Kecamatan Bendo	Internal	UC	Indek Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap kinerja kesekretariatan Kecamatan Bendo kurang optimal.	Pemerintah Kabupaten Magetan	3	3	9	Mengusulkan pengisian penambahan ASN jabatan yang kosong dan pelatihan seluruh ASN yang memadai sesuai kebutuhan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	Adanya potensi capaian indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan Kecamatan kurang optimal	RSO36	Kepala Kecamatan Bendo	Kurangnya sosialisasi dan penekanan kepada penerima layanan untuk mengisi e-skm	Internal& Eksternal	C	Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan desa tidak tepat waktu	Pemerintah Kabupaten Magetan	2	2	4	Melaksanakan sosialisasi, pemberitahuan dan penekanan kepada penerima layanan untuk mengisi e-skm dan memberikan saran masukan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakat	Pengelolaan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di masing-masing pokja masih rendah	RSO36	Kepala Kecamatan Bendo	Kurangnya disiplin dan kemampuan para perangkat atau aparatur desa dan kelurahan	Internal& Eksternal	UC	Penyampaian laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tidak tepat waktu	Pemerintah Kabupaten Magetan	3	2	6	Kepala daerah membuat program peningkatandisiplin dan kemampuan para perangkat atau aparatur desa dan kelurahan
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan masyarakat	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Belum Maksimal	RS0 01	Kepala Kecamatan Bendo	Kurangnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan	Internal& Eksternal	C	Terlambatnya Kegiatan Pemerintah Desa	Pemerintah Kabupaten Magetan	2	2	4	Kepala Daerah Melakukan Monev Internal

Hasil evaluasi APIP setelah diskusi dengan manajemen

Petunjuk Pengisian

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPD/Renstra

Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan

Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko (RSP + Risiko Strategis Pemda dimiliki oleh Kepala Daerah, RSO=Risiko Strategis OPD dimiliki oleh Kepala OPD)

Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom(9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko

Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi

Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi

Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko

Kolom (30) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko

Kolom (31) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan

Untuk identifikasi risiko strategis Pemda maupun OPD bisa mempertimbangkan hal-hal yang menghambat pencapaian dari indikator dari tujuan/sasaran tersebut

Daftar Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Magetan
Nama OPD : Kecamatan Bendo
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Sasaran Area MCP	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Nilai Risiko			Rencana Tindak Pengendalian (Fraud Risk Response)	Target Waktu Pelaksanaan Pengendalian	Pelaksanaan Pengendalian	Bukti Pelaksanaan	Kendala	OPD Pemilik Risiko	Keterangan Pengisian
									Kemungkin an	Dampak	Status Risiko (Nilai)							
1	Sasaran MCP1: Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah 2026	Terlambatnya pelaksanaan Musrembang			PA/PAK	Jadwal yang bertumpukan dengan agenda lain	Perencanaan Program terhambat	4	4	16	Penyusunan jadwal Musrenbang yang disampaikan melalui Surat Edaran Kepala Daerah	Triwulan I 2025	Surat Edaran Kepala Daerah yang menginformasikan tentang jadwal Musrenbang	Dokumentasi Pelaksanaan Musrembang	Contoh: Jadwal Musrenbang harus menyesuaikan tiap Kecamatan	Kecamatan Bendo	Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses perencanaan
	Sasaran MCP1: Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah 2026	Program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah								0	Verifikasi program dan kegiatan sehingga sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.		Pelaksanaan Verifikasi program dan kegiatan sehingga sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah			Kecamatan Bendo	Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses perencanaan
2	Sasaran MCP1: Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengajuan Pokok Pikiran untuk APBD 2026	Contoh: Data pengajuan POKIR tidak valid/ada pemalsuan								0						Bappeda Litbang, Setwan, DTPHP, Bakesbangpol, PUPR, Disnakan, Disperindag, PMD, Perkim	Daftar risiko mulai proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodinya pokok pikiran dalam APBD 2024
	Sasaran MCP1: Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengajuan Pokok Pikiran untuk APBD 2026	Contoh: Keterlambatan verifikasi pokir								0						Bappeda Litbang	Daftar risiko mulai proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodinya pokok pikiran dalam APBD 2025
	Sasaran MCP1: Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengajuan Pokok Pikiran untuk APBD 2026	Contoh: Usulan POKIR yang dilooskan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu								0						Kecamatan Panekan	Daftar risiko mulai proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodinya pokok pikiran dalam APBD 2026
3	Sasaran MCP1: Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026									0						Bappeda Litbang, Setwan, DTPHP, Bakesbangpol, PUPR, Disnakan, Disperindag, PMD, Perkim, Dinkop	Daftar risiko dalam proses penyaluran bantuan hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026
4	Sasaran MCP2.1: Pengelomban (Mark Up) Anggaran	Proses Penentuan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya	Contoh: Mark Up Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya								0						BPKPD	Daftar Risiko Korupsi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya
5	Sasaran MCP2.2: Penetapan Anggaran	Proses pengesahan APBD Murni dan APBD Perubahan	Contoh: Penetapan Anggaran tidak sesuai prioritas alokasi anggaran								0						BPKPD, Setwan	Daftar risiko Korupsi pada proses pengesahan APBD Murni 2026 dan APBD Perubahan 2025
	Sasaran MCP2.2: Penetapan Anggaran	Proses pengesahan APBD Murni dan APBD Perubahan	Contoh: Adanya pemberian susup pada Penetapan Anggaran tidak sesuai prioritas alokasi anggaran								0						BPKPD, Setwan	Daftar risiko Korupsi pada proses pengesahan APBD Murni 2026 dan APBD Perubahan 2025
6	Sasaran MCP 3.1: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Contoh Tahap perencanaan: (1) penggelombungan dana (mark up) rencana pengadaan, (2) pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu, (3) perencanaan yang tidak realistis, terutama terkait waktu pelaksanaan, (4) panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan bahkan dapat dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, (5) harga perkiraan sendiri (HPS) dalam rencana PBJ ditutup-tutupi, dan (6) harga dasar tidak disesuaikan dengan standar yang ada. (7), spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu, (8) dokumen lelang tidak disesuaikan dengan standar yang ada, dan terakhir (9) dokumen lelang tidak lengkap.								0						1. Bagian PBJ 2. 3 OPD Strategis Dindik, Dinkes dan Dinas PUPR 3. OPD Lainnya juga dapat memetakan risiko kecurangan ini	Daftar risiko Korupsi pada proses Pengadaan Barang dan Jasa
			Contoh Tahap PBJ (1) jangka waktu pengumuman proses pengadaan barang dan jasa menjadi singkat, (2) pengumuman tidak lengkap dan membingungkan, (3) penyebaran dokumen tender tampak cacat, dan (4) dilakukan pembatasan informasi oleh panitia agar kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap, (5) penjelasan tentang proyek (aanwijzing) diubah menjadi tanya jawab, (6) adanya upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlewat menyampaikan dokumen penawarannya, (7) penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi di dalam dokumen awal, (8) panitia bekerja secara tertutup, (9) pengumuman pemenang tender hanya dilakukan kepada kelompok tertentu, (10) tidak semua sanggahan ditanggapi, dan terakhir (11) surat penetapan segera ditunda pengeluarnya.								0						1. Bagian PBJ 2. 3 OPD Strategis Dindik, Dinkes dan Dinas PUPR 3. OPD Lainnya yang memiliki Proyek Strategis dapat memetakan risiko kecurangan ini	Daftar risiko Korupsi pada proses Pengadaan Barang dan Jasa

[illegible]

13	Sasaran MCP 6: Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)	Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (SMD)	Adanya penyalahgunaan penggunaan BMD								0							Bidang Aset BPKPD, Perkim, PUPR dan OPD lainnya bisa memetakan risiko dapat,	1. Adanya daftar risiko korupsi (Risk Register) dalam proses pengelolaan BMD. 2. Terlaksananya langkah langkah mitigasi risiko korupsi proses hansakikan RMPN
14	Sasaran MCP 7 : Pencegahan Terjadinya Kebocoran Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Contoh: Adanya pungli pada penerimaan retribusi Adanya penerimaan dari pajak/retribusi yang tidak masuk kas daerah								0							Pajak: 1. BPKPD Retribusi: 2. Indag (Bidang Pasar) 3. Disbudpar 4. Disbudpar 5. Disnakan 6. Dikpora 7.DTPHP 8.PU	Adanya daftar inventarisasi risiko korupsi pada Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah beserta pelaksanaannya

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bendo	2,690,582,426
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bendo	21,812,500
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bendo	930,183,510
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Bendo	55,700,000

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi jumlah anggaran program pada tahun 2023 Perubahan sesuai P-APBD

